

# Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah

**Dewi Puspitasari**

Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta  
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta  
Email: [dewi@janabadra.ac.id](mailto:dewi@janabadra.ac.id)

**Budi Setyanta**

Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta  
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta  
Email: [budi@janabadra.ac.id](mailto:budi@janabadra.ac.id)

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Regresi linear berganda digunakan dalam penelitian untuk membuktikan hipotesis pada model penelitian. Variabel Tata kelola publik diukur dengan Indeks Governance yang dibuat oleh Kemitraan, variabel PAD diukur menggunakan log dari nilai pendapatan asli daerah sebenarnya, dan variabel total aset juga diukur menggunakan log dari nilai sebenarnya. Variabel dependen kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibuat Kementerian Dalam Negeri. Data yang digunakan adalah 33 propinsi di Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola publik dan pendapatan asli daerah mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, total aset tidak mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (propinsi). Sehingga salah satu tujuan otonomi daerah yaitu kemandirian daerah dapat tercapai. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh dalam memoderasi.*

**Kata Kunci:** *Tata kelola publik; kinerja pemerintah daerah; Pendapatan Asli Daerah; Total Aset; Indonesia*

## **Abstract**

*This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of public governance, local own-source revenue and total assets on the performance of local governments in Indonesia. Multiple linear regression is used in research to prove hypotheses in the research model. The Public Governance variable is measured by the Governance Index created by the Partnership, the PAD variable is measured using a log of the actual local revenue value, and the total asset variable is also measured using a log of the actual value. The dependent variable of local government performance is measured by the performance score of local government administration made by the Ministry of Home Affairs. The data used were 33 provinces in Indonesia in 2016. The results showed that public governance and local own-source revenue positively influenced the performance of local governments. Conversely, total assets do not positively affect the performance of local governments. Good public governance absolutely must be implemented by the regional (provincial) government. Improvements in public governance mechanisms can improve local government performance. Another thing found in this study is that an increase in regional own-source revenue will improve the performance of the regional (provincial) government. So that one of the objectives of regional autonomy, namely regional independence can be achieved. Future studies can use other variables that are thought to influence in moderating.*

**Keywords:** *Public governance; local government performance; Locally-generated revenue; Total Assets; Indonesia*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan sosial dan politik saat ini telah membuka mata bagi masyarakat luas untuk ikut andil dalam pembangunan perekonomian negara. Tata kelola publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi materi penting yang tidak lepas dari kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Tata kelola publik merupakan salah satu upaya dalam bentuk suatu konsep dari implementasi kebijakan pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih yang diimplementasikan saat ini dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Laporan Akhir IGI, 2018). Suksesnya kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan bangsa tidak terlepas dari bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah dalam melayani publik dilakukan. Penelitian Hasthoro dan Sunardi (2016) membuktikan bahwa tata kelola publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sependapat dengan Hasthoro dan Sunardi (2016), Syamsul dan Ritonga (2017) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga memperbaiki kinerja pemerintah baik di daerah maupun pusat. Tata kelola yang baik pada pemerintah bisa diindikasikan dari opini audit, sehingga opini audit menunjukkan kualitas tata kelola pemerintah (Tehupuring, 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi tata kelola publik akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Salah satu upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara mencapai kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD'45 alenia ke empat adalah dengan meningkatkan kinerja pemerintah yang dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti bahwa usaha peningkatan pendapatan asli daerah erat kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Lin et al. (2010) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap indeks kinerja ekonomi di Cina. Omodero (2018) juga menyatakan hal yang sama dalam penelitiannya yang membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kinerja dan pertumbuhan perekonomian. Meskipun begitu Owusu (2015) dan Ironkwe and Ndah (2016) berhasil menemukan dan membuktikan dalam penelitiannya bahwa IGR (locally generated revenue) atau pendapatan local daerah secara positif signifikan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Kebijakan keuangan daerah digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan agar memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Upaya lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan telah dilakukan pemerintah demi mendukung terwujudnya tujuan bangsa yaitu dengan pengelolaan asset daerah yang tepat. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pengelolaan barang milik negara/daerah membutuhkan perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pengawasan serta kordinasi yang baik antar bagian yang terkait sehingga total asset mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Simamora dan Halim (2012) dalam penelitian mereka yang menemukan bahwa faktor pengelolaan asset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya tuntutan masyarakat yang berakar dari ketidakpastian manfaat layanan tata kelola publik dari instansi pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk dapat mencapai target yang maksimal untuk

kesejahteraan rakyat sesuai yang telah ditentukan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan instansi pemerintah mendapatkan banyak perhatian dari publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana hubungan antara tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total asset daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga dapat memberikan bukti nyata bagaimana upaya pemerintah yang saat ini dilakukan di Indonesia telah tepat dan efektif bagi terselenggaranya pemerintah daerah yang baik demi mewujudkan pembangunan bangsa yang berkesinambungan.

## **B. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah suatu kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil pekerjaan. Kinerja pemerintah merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola pemerintahan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Semakin baik pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah terhadap system akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang asset milik daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Auditya dan Lismawati, 2013).

Kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD sebagai variabel dependen. Skor EKPPD digunakan karena dari skor ini dapat dilihat bagaimana suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Dwi Martani (2017) dalam penelitiannya setidaknya telah menemukan bahwa skor EKPPD telah mencerminkan 3 ukuran dimensi yaitu kualitas hidup lintas pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan. Sumber informasi utama dari nilai skor EKPPD didapat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). EKPPD dilaksanakan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi (Manual EKPPD tahun 2016):

#### *1. Indeks Capaian Kinerja (bobot 95%)*

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu: 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah; 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah; 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD; 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; 12) Pengelolaan potensi daerah; dan 13) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus (total 35 fokus), dan setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan

provinsi total 39 IKK, Kabupaten 44 IKK dan kota 43 IKK. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

- b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu: 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 16 3) Penataan kelembagaan daerah; 4) Pengelolaan kepegawaian daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah; 6) Pengelolaan keuangan daerah; 7) Pengelolaan barang milik daerah; dan 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, lalu dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21 IKK. Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

- c. Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja dibagi 2, yaitu 1. Urusan Wajib, terdiri dari: a) Pemerintah Provinsi 62 Indikator Kinerja Kunci (IKK). b) pemerintah Kabupaten 79 IKK. c) Pemerintah Kota 78 IKK. 2. Urusan Pilihan, terdiri dari: a) Pemerintah Provinsi 16 Indikator Kinerja Kunci (IKK). b) Pemerintah Kabupaten 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK). c) pemerintah Kota 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK). d. Metode Penilaian Capaian Kinerja Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 tersebut diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 1. Kriteria Umum, Penilaian yang dilakukan terhadap seluruh IKK: 17. a) Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya ketepatan waktu penyerahan LPPD, Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan, dan seterusnya. b) Berdasarkan rata-rata nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi; angka kemiskinan, angka melek huruf, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah. c) Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh tim teknis EPPD melalui metode normalisasi. 2. Kriteria khusus a) Kriteria khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya. b) Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya.

## 2. Indeks Kesesuaian Materi (bobot 5%)

Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah). Kemudian setiap tahunnya Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan nilai/skor kinerja dari setiap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten. Kemendagri selanjutnya akan menetapkan peringkat dari hasil skor kinerja yang 18 disampaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Skor kinerja tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 1 Pengelompokan Indeks EKPPD dan Status Prestasi**

Nomor	Indeks EKPPD	Prestasi
1	3,00 < Skor ≤ 4,00	Sangat Tinggi
2	2,00 < Skor ≤ 3,00	Tinggi
3	1,00 < Skor ≤ 2,00	Sedang
4	0,00 ≤ Skor ≤ 1,00	Rendah

Sumber: Manual EKPPD Tahun 2016 Kemendagri (data diolah)

## 2. Tata Kelola Publik

Pembangunan daerah yang baik harus diawali dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola publik yang baik (*good governance*) menjadi salah satu upaya dalam bentuk suatu konsep dari implementasi kebijakan pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih yang diimplementasikan saat ini dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (IGI, 2018). Konsepsi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Sedarmayanti (2004) dalam Heryana dan Dewi (2013) secara konseptual kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Tata kelola merupakan kebiasaan budaya, institusi politik, dan system ekonomi yang dapat berjalan selaras dalam masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang diharapkan (Berrgruen dan Gardels, 2013). Tata kelola pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah berada pada model tata kelola yang menuntut partisipasi warga yang aktif, melalui keterlibatan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk publik (Tholen, 2015). Tata kelola yang baik dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam upaya pembangunan perekonomian yang baik sehingga dapat untuk melaporkan informasi keuangan maupun non keuangan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, baik secara langsung maupun tidak langsung memerlukan pihak lain yang membantu melaksanakan tugas pemerintah mulai dari menyusun, membuat, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan monitoring implementasi kebijakan dari masing-masing pihak yang tentunya memberikan kemudahan maupun efektifitas pembangunan daerah. Mardiasmo (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 3 mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar lebih responsive, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

Tata Kelola Publik dalam penelitian ini diukur menggunakan skor nilai Indonesian Governance Index (IGI) sebagai variabel independen. IGI menjelaskan bahwa prinsip pengukuran tata kelola pemerintahan dilakukan untuk menyesuaikan dan memberikan batasan dalam pengukuran agar memiliki keseragaman dalam pengukuran. IGI mengukur kinerja pemerintahan daerah, khususnya terhadap empat arena pemerintahan yaitu arena pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur:

- a. Pemerintah adalah badan pembuat kebijakan yang mencakup eksekutif dan legislatif. Eksekutif merujuk pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki otoritas dalam pembuatan kerangka kebijakan serta penganggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif memiliki kekuasaan untuk memerintah dan mengkoordinasikan pembangunan. Sementara itu, DPRD memiliki hak eksekutif untuk mengawasi proses pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif dan birokrasi.
- b. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini birokrasi termasuk sekretariat daerah dan dinas-dinas yang ada di provinsi maupun kabupaten. Di antara banyak fungsi penting birokrasi, fungsi-fungsi utama yang akan diukur dalam kegiatan ini adalah fungsi pelayanan publik, fungsi sebagai pengumpul pendapatan daerah dan fungsi pengaturan ekonomi daerah.
- c. Masyarakat sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, media (cetak maupun elektronik) asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. Diantara banyaknya fungsi masyarakat sipil, kemitraan mempertimbangkan fungsi-fungsi utama yang akan diukur, yaitu fungsi pemberdayaan sebagai fungsi yang paling penting.
- d. Masyarakat ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan

(profit). Fungsi-fungsi utama yang diukur adalah kemampuan dalam mendorong iklim bisnis yang lebih baik serta memiliki upaya dalam melindungi kepentingan bisnis melalui kegiatan ekonomi dan produksi.

Hasil dari IGI menyajikan: 1. Profil kinerja tata kelola pemerintahan di masing-masing wilayah; 2. Peringkat secara keseluruhan dari semua wilayah; 3. Peringkat wilayah berdasarkan arena tata kelola; 4. Data-data komprehensif terkait dengan isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 yang berbunyi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah sebagai perwujudan desentralisasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tahar dan Zakiya, 2011). Kemampuan suatu daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya dalam menggali sumber-sumber keuangan dan melaksanakan kebijakannya dengan dibiayai dari sumber-sumber keuangannya tersebut. Pendapatan asli daerah adalah parameter dan indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terutama di bidang keuangan (Darmi, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun sehingga lazim jika pertumbuhan ekonomi juga digunakan menjadi salah satu indikator dalam pengukuran Indeks Capaian Kinerja dalam proses penghitungan skor EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Adapun tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut Todaro (1997) dalam Tahar dan Zhakiya (2011), yaitu:

- a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
- c. Kemajuan teknologi.

Adapun sumber PAD menurut Undang-Undang no 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 2006). PAD memiliki hubungan yang simultan terhadap kinerja pemerintah daerah yang tampak dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan disisi lain dapat meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk digunakan mencukupi fasilitas dan layanan kepada masyarakat sehingga produktifitas dan kinerja pemerintah daerah juga semakin baik sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Mardiasmo (2002) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya semakin baik (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

#### **4. Total Aset**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Daerah dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Pengelolaan data aset terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset sangat berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggung jawaban secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menyebutkan bahwa Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi: a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) pengadaan; c) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d) penggunaan; e) penatausahaan; f) pemanfaatan; g) pengamanan dan pemeliharaan; h) penilaian; i) penghapusan; j) pemindahtanganan; k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian; l) pembiayaan; m) tuntutan ganti rugi. Pentingnya pengelolaan data aset pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah berguna untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan data sehingga dapat dilakukan perbaikan manajemen dan teknologi Informasi untuk mendukung kerja sumber daya manusia dalam tugas manajemen (Ambarita, 2016). Oleh sebab itu maka adanya suatu peningkatan dalam berbagai bidang kegiatan dalam menunjang proses pelayanan yang berhubungan dengan administrasi pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perlu dilakukan.

#### **5. Hubungan Tata Kelola Publik dengan Kinerja Pemerintah Daerah**

Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dengan melibatkan aspirasi masyarakat didalam prosesnya. Bovaird dan Loffler (2003) dalam tulisannya menjelaskan bahwa administrasi publik sebenarnya mempelajari tentang bagaimana kinerja pegawai pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat termasuk hubungannya dengan politisi yang terlibat dalam proses legislasi dan penentuan kebijakan publik. Syamsul dan Ritonga (2017) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian Hasthoro dan Sunardi (2016) juga membuktikan bahwa tata kelola publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tata kelola publik memfokuskan bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan pelayanan publik dilakukan (Osborne 2010), yang menyangkut perilaku dan kontribusi pada kinerja pemerintahan (Hill dan Lynn Jr 2004). Tata kelola yang baik pada pemerintah bisa diindikasikan dari opini audit, sehingga opini audit menunjukkan kualitas tata kelola pemerintah (Tehupuring, 2018).

*H1: Tata Kelola Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*

#### **6. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar sumber daya yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan dan pembangunan serta dapat menggali potensi-potensi daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kinerja pemerintah daerah yang baik ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Adanya

peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk digunakan mencukupi fasilitas dan layanan kepada masyarakat sehingga produktivitas dan kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Dalam penerapan pemerintahan secara desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD (Harianto & Hari Adi, 2007). PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004). Sependapat dengan penelitian sebelumnya Mustikarini dan Fitriyani (2012) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota pada tingkat keyakinan sebesar 90%, hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Lin et al. (2010) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap indeks kinerja ekonomi di Cina. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006). Omodero et.al (2018) juga membuktikan secara empiris bahwa pendapatan yang dihasilkan secara lokal di Nigeria secara signifikan berpengaruh terhadap perekonomian warga Negara.

Berbeda dari penemuan-penemuan diatas, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Owusu (2015) dan Ironkwe and Ndah (2016) berhasil menemukan dan membuktikan dalam penelitiannya bahwa IGR (locally generated revenue) atau pendapatan local daerah secara positif signifikan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Yang artinya pendapatan asli daerah atau local secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan secara positif, karena kinerja pemerintah yang baik ditandai dengan peningkatan perekonomian Negara.

*H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*

## **7. Hubungan Total Aset dengan Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

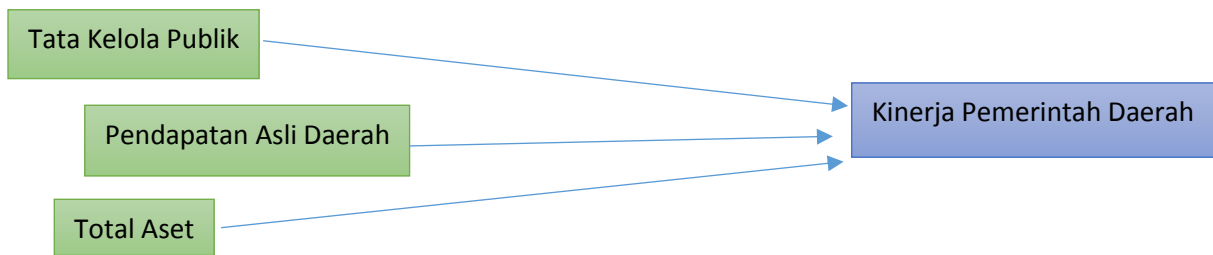
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pengelolaan barang milik negara/daerah membutuhkan perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pengawasan serta kordinasi yang baik antar bagian yang terkait sehingga total asset mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Simamora dan Halim (2012) dalam penelitian mereka yang menemukan bahwa faktor pengelolaan asset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) juga mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksi dengan ln total asset berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tingkat keyakinan 99% yang telah sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sumarjono (2010) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia.

*H3: Total Aset berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*

## **8. Model Penelitian**

Model penelitian merupakan hubungan antara variabel amatan yang telah diidentifikasi secara teoritis untuk menjawab permasalahan penelitian (Sekaran and Bogie, 2013). Berdasarkan pengembangan hipotesa di atas, maka model penelitian dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.





**Gambar 1 Model Penelitian**

Model penelitian menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tata Kelola Publik, Pendapatan Asli Daerah, dan Total Aset. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Model penelitian di atas menjelaskan pengaruh antara tata kelola publik dengan kinerja pemerintah daerah (H1), hubungan pengaruh pendapatan asli daerah dengan kinerja pemerintah daerah (H2), dan hubungan pengaruh total aset dengan kinerja pemerintah daerah (H3).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian eksplanasi karena menjelaskan hubungan kausalitas antara variabelnya.

Desain penelitian ini dikembangkan dengan mengembangkan model penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hasthoro dan Sunardi (2016), dengan memberikan pembeda pada variabel independen tata kelola publik, pendapatan asli daerah, dan total aset serta merubah variabel dependen menjadi skor EKPPD sebagai tolak ukur pengukuran kinerja pemerintah daerah. Alasan penggunaan variabel independen tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset adalah karena variabel tersebut juga merupakan bagian dari LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yang merupakan sumber informasi utama dari EKPPD (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah) yang dijadikan sebagai proksi dari kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini.

#### **1. Objek Penelitian dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2016, indeks governance Indonesia (IGI), data jumlah Pendapatan Asli Daerah serta data Total Aset. Data kuantitatif tersebut diperoleh dari publikasi data oleh Kemitraan ([kemitraan.or.id](http://kemitraan.or.id)) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia. Sedangkan pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik sensus sampling, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Berikut table hasil pendataan dari setiap variabel dalam penelitian:

**Tabel 2 Hasil Pendataan nilai IGI, PAD, ASET, dan EKPPD**

No	Nama Propinsi	IGI (X1)	PAD (X2)	ASET (X3)	Kin (Y)
1	NAD	5,82	5,96	13,26	1,79
2	Sumatera Utara	5,94	6,68	13,12	2,20
3	Sumatera Barat	5,70	6,12	12,91	2,46
4	Riau	6,18	6,38	13,38	2,00
5	Jambi	6,24	5,91	12,82	2,22
6	Sumatera Selatan	6,19	6,36	13,20	2,30
7	Bengkulu	4,81	5,70	12,44	2,06
8	Lampung	6,01	6,34	12,80	1,82
9	Bangka Belitung	5,97	5,67	12,51	2,34
10	Kepulauan Riau	5,60	5,80	12,61	2,69
11	DKI Jakarta	6,37	7,43	14,59	2,66
12	Jawa Barat	5,88	6,99	13,35	2,69
13	Jawa Tengah	5,88	6,82	13,33	2,90
14	DIY	<b>6,80</b>	6,01	12,76	2,49
15	Jawa Timur	6,43	6,98	13,54	3,06
16	Banten	5,85	6,55	12,95	2,20
17	Bali	6,23	6,29	12,73	1,88
18	NTT	4,87	5,64	12,73	1,73
19	NTB	5,74	5,90	12,71	2,20
20	Kalimantan Barat	5,11	6,13	12,58	2,15
21	Kalimantan Tengah	5,95	5,94	12,93	2,49
22	Kalimantan Selatan	6,19	6,44	12,99	2,43
23	Kalimantan Timur	5,66	6,71	13,05	2,59
24	Sulawesi Utara	6,17	5,81	12,48	2,28
25	Sulawesi Tengah	5,74	5,79	12,65	2,25
26	Sulawesi Selatan	5,67	6,41	13,05	2,73
27	Sulawesi Tenggara	5,05	5,62	12,61	1,90
28	Gorontalo	5,64	5,28	12,20	2,23
29	Sulawesi barat	5,91	5,21	12,08	2,17
30	Maluku	4,95	5,47	12,67	2,10
31	Maluku Utara	4,45	5,12	12,26	1,37
32	Papua Barat	4,48	5,15	12,68	1,70
33	Papua	4,88	5,61	13,23	1,93

Sumber: Data Sekunder dari Kementrerian Dalam Negeri Republik Indonesia

## 2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam model penelitian ini adalah variabel kinerja pemerintah daerah (skor EKPPD) sebagai variabel dependen (terikat) dan variabel tata kelola publik (indeks governance), PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta Size (Total Aset) sebagai variabel independen. Definisi operasionalisasi masing-masing variabel penelitian ditetapkan sebagai berikut:

### a. Kinerja Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini kinerja pemerintah daerah diukur menggunakan skor EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci. EKPPD merupakan penilaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Kriteria penilaian yang diputuskan terhadap skor kinerja tersebut terbagi ke dalam 4 tingkatan prestasi skala penilaian 0-4. Tinggi rendahnya skor EKPPD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai berarti penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah (Dharma & Martani, 2016).

### b. Tata Kelola Publik

Variabel Tata Kelola Publik atau *Good Governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan IGI (*Indonesian Governance Index*). IGI merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah khususnya terhadap empat pilar pemerintahan yaitu arena pemerintah (legeslatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur dengan menggunakan skala 1 hingga 10. Semakin tinggi nilai berarti semakin baik. IGI digunakan untuk mengukur sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan bukti-bukti lengkap yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan baku rujukan untuk evaluasi bagi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan sehingga standar pengembangan yang diterapkan dapat efektif dan efisien.

### c. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dihitung dan dianalisis dengan menggunakan angka log dari nilai PAD setiap Propinsi yang terdapat di Indonesia. Tujuan menggunakan nilai log dari nilai PAD dalam proses analisis hipotesis adalah untuk menyeragamkan dengan nilai skala yang digunakan variabel lain dalam penelitian ini sehingga dapat diolah dengan menggunakan regresi berganda cross-section.

### d. Total Aset

Variabel Total Aset dalam penelitian ini dihitung dan dianalisis dengan menggunakan angka log dari nilai Total Aset Daerah setiap Propinsi yang terdapat di Indonesia. Tujuan menggunakan nilai log dari nilai Total Aset dalam proses analisis hipotesis adalah untuk menyeragamkan dengan nilai skala yang digunakan variabel lain dalam penelitian ini sehingga dapat diolah dengan menggunakan regresi berganda cross-section.

## 3. Teknik Analisis Data

### a. Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran jelas pada suatu data yang digunakan sebagai variabel penelitian dilihat dari nilai mean, maksimum, minimum, standar deviasi.

### b. Pengujian Data

Uji hipotesis digunakan dengan analisis regresi berganda kepada 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Tata Kelola Publik (*Public Governance*)
- X2 = Total Aset (*Size*)
- X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uji adjusted R Square digunakan untuk melihat kemampuan model regresi dalam menjelaskan pengaruh variabel Tata Kelola Publik, PAD, dan Total Aset terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Uji F atau uji signifikansi simultan digunakan dengan tujuan untuk melihat ketepatan apakah semua model variabel Tata Kelola Publik, PAD, dan Total Aset dalam model mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Uji t atau uji signifikansi parameter individual (t) ditujukan untuk melihat seberapa jauh variabel Tata Kelola Publik, PAD, dan Total Aset dapat menjelaskan variabel Kinerja Pemerintah Daerah.

#### D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Dari jumlah populasi sampel penelitian yaitu 33 propinsi yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2016 maka diperoleh sebagai berikut:

##### 1. Statistik Deskriptif

Berikut adalah tabel statistik deskriptif Tata Kelola Publik (IGI), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Aset (Size), dan Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD):

**Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif**

Var	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
IGI	33	4,450	6,800	5,704	0,586
PAD	33	5,123	7,426	6,067	0,5677
ASET	33	12,007	14,588	12,884	0,4677
Kinerja	33	1,372	3,057	2,256	0,369

*Sumber: hasil olah data*

Merujuk pada statistik deskriptif untuk nilai mean tata kelola publik (IGI) adalah 5,704 yang memberikan makna sedang. Indeks tata kelola publik berkisar antara 0 (terendah) hingga 10 tertinggi. Beberapa aspek dalam tata kelola harus ditingkatkan lagi seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan terutama pada persoalan efisiensi. Pemerintah Propinsi perlu bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan tata kelola yang baik agar bisa memberi pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Pemerintah juga harus memperhatikan faktor budaya, karena budaya merupakan kendala utama birokrasi dalam melakukan pelayanan publik (Maryam 2016).

Nilai mean PAD pemerintah propinsi di Indonesia adalah 6,067 (Log) atau setara 2,8 triliun rupiah. Nilai ini tergolong rendah karena tidak mencukupi untuk keperluan pembangunan di pemerintahan propinsi. Sehingga wajar saja jika pemerintah propinsi masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan dana bagi hasil pajak.

Dalam hal kekayaan daerah yang terwujud dalam total aset, rerata total aset pemerintah propinsi di Indonesia senilai 12,884 (Log) atau setara 20,7 triliun rupiah. Jumlah tersebut tergolong cukup besar dan dapat dioptimalkan dalam memberi pelayan kepada masyarakat.

Pada konteks kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Propinsi mempunyai nilai mean 2,256 yang memberikan makna tinggi. Skor kinerja pemerintah daerah berkisar antara 1,00 sampai dengan 3,75. Secara umum kinerja pemerintah propinsi sudah baik, tetapi kondisi ini belum mencerminkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan pada fakta yang mengungkap masih banyak kasus korupsi di pemerintahan. Tehupuring (2018) menyatakan opini audit wajar tanpa pengecualian yang merupakan cerminan kualitas laporan keuangan pun tidak menjamin pemerintahan akan terbebas dari korupsi.

## 2. Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis untuk model penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut:

### a. Koefisien Determinasi

**Tabel 4 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,469	0,414

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji regresi menunjukkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sampel penelitian yang terdaftar adalah 0,414. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 41% nilai variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah atau dalam penelitian ini diproksikan dengan nilai skor EKPPD dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian, sedangkan 59 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

### b. Uji Statistik F

**Tabel 5 Hasil Uji Statistik F**

Model	F	Signifikansi
1	8.5633	0,000 <sup>a</sup>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji statistik F diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 atau  $\leq 0,05$  hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Variabel dependen penelitian atau Kinerja Pemerintah Daerah.

### c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Cross-Section**

Variabel	Pengaruh Diharapkan	Koefisien	T	Sig
(Constant)		0.483	0.265	0.792
Tata Kelola Publik ( <i>IGI</i> )	+	0.180	1.632	0.011
PAD	+	0.394	2.195	0.036
Total Aset	+	-0.128	-0.675	0.504
<i>R Square</i>		0.469		
<i>Adjusted R-Square</i>		0.414		
F		8.5633		
Sig		0.000 <sup>a</sup>		

a. Predictors: (Constant), Tata kelola publik, Pendapatan asli daerah, Total aset

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi. *Sumber: hasil olah data*

Dari Tabel 6, menunjukkan variabel Tata Kelola Publik pada sampel penelitian yang terdaftar berturut-turut memiliki nilai koefisien sebesar 0,180; nilai t hitung sebesar 1,632 serta nilai signifikansi sebesar 0,011 ( $< 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima** atau dengan kata lain variabel independen Tata Kelola Publik pada sampel yang digunakan dalam penelitian

berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah. Penerimaan H1 dalam penelitian ini berarti mengindikasikan bahwa peningkatan mekanisme layanan Tata Kelola Publik yang diprosikan dengan nilai IGI suatu daerah (Propinsi) dapat memperbaiki dan mengoptimalkan hasil kinerja pemerintah daerah (dalam penelitian ini diwakilkan dengan skor nilai EKPPD) dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah. Hal ini berarti telah konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Syamsul dan Ritonga (2017) dan Hastoro dan Sunardi (2016) yang membuktikan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh positif signifikan pada transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik melalui perbaikan kebijakan dan proses birokrasi yang jelas dapat memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah.

Berdasarkan Tabel 6 di atas juga menunjukkan secara statistik variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah propinsi dengan nilai koefisien sebesar 0,394; nilai t hitung sebesar 2,195 serta nilai signifikansi sebesar 0,036 ( $<0,05$ ) dengan arah positif berarti **H2** atau Hipotesis penelitian 2 **diterima**. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah memperkuat hubungan antara tata kelola publik dengan kinerja pemerintah daerah (propinsi) seperti temuan Pratolo (2008), Hastoro dan Sunardi (2016) serta Mustikarini dan Fitriyani (2012). Variabel pendapatan asli daerah juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah propinsi yang menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (propinsi). Lin et al (2010), Tambunan (2006), serta Omodero (2018) juga menyatakan hal yang sama dalam penelitiannya yang membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kinerja dan pertumbuhan perekonomian. PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan dan pembangunan serta dapat menggali potensi-potensi daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Selain itu ketidak signifikannya nilai koefisien dapat berarti bahwa pola hubungan pusat dan daerah di era otonomi ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah daerah masih banyak menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil pajak. Sehingga, jika pemerintah daerah (propinsi) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah maka ini sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (propinsi). Namun berbeda dari penemuan-penemuan diatas, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Owusu (2015) dan Ironkwe and Ndah (2016) berhasil menemukan dan membuktikan dalam penelitiannya bahwa IGR (locally generated revenue) atau pendapatan local daerah secara positif signifikan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Variabel Total Aset atau Size sampel yang terdaftar dalam Tabel 6 berturut-turut memiliki nilai koefisien sebesar -0,128; nilai t hitung sebesar 0,675 serta nilai signifikansi sampel sebesar 0,504 ( $>0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **H3 ditolak** atau dengan kata lain variabel nilai Total Aset dari sampel propinsi atau daerah yang terdapat di Indonesia di tahun 2016 tidak berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah atau skor EKPPD. Penolakan H3 dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh Total Aset daerah terhadap nilai skor EKPPD karena kondisi masing-masing daerah sampel atau propinsi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh daerah sehingga asset-asset pemerintah daerah juga merupakan asset pemerintah pusat, serta belum adanya pengelolaan asset asli daerah yang baik sehingga dapat memaksimalkan manfaat bagi terselenggaranya kinerja pemerintah daerah yang optimal oleh sebab itu hasil pengujian hipotesis ketiga ini terbukti belum sepenuhnya mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Simamora dan Halim (2012) dalam penelitian mereka yang menemukan bahwa faktor pengelolaan asset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) serta Ambarita (2016) yang menemukan bahwa Daerah dengan total asset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya sehingga pengelolaan data asset terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi

pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset sangat berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Pada penelitian ini pengelolaan data aset terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset belum berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi utama dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pemerintah daerah atau propinsi sehingga secara uji statistik tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari total aset terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **E. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada model penelitian dan pembahasan, maka simpulan penelitian ini dapat jelaskan sebagai berikut.

Hipotesis pertama (H1) penelitian diterima. Penerimaan H1 berarti bahwa Penelitian ini menyatakan dan berhasil membuktikan secara empiris bahwa variabel independen tata kelola publik mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian kinerja pemerintah daerah. Semakin baik tingginya nilai IGI (tata kelola publik) dalam pemerintahan suatu daerah (propinsi di Indonesia) maka semakin meningkatnya skor EKPPD (kinerja pemerintah daerah) sehingga variabel tata kelola publik sudah tepat digunakan sebagai salah satu upaya pemerintah yang harus diperhatikan dan ditingkatkan perbaikan dan layanannya. Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis kedua (H2) penelitian diterima. Penerimaan H2 berarti bahwa variabel independen penelitian pendapatan asli daerah secara empiris berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen penelitian kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (propinsi). Sudah sewajarnya jika pemerintah daerah fokus pada pendapatan asli daerah dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga salah satu tujuan otonomi daerah yaitu kemandirian daerah dapat tercapai.

Hipotesis ketiga (H3) penelitian ditolak. Penolakan H3 ini berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara variabel independen penelitian Total Aset (Size) terhadap variabel dependen penelitian kinerja pemerintah daerah (skor EKPPD) pada kelompok sampel. Pengelolaan aset asli daerah yang baik diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan bagi terselenggaranya kinerja pemerintahan daerah yang optimal.

### **2. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada:

- a. Para stakeholder dan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah maupun pembuatan kebijakan-kebijakan operasional yang terkait.
- b. Peningkatan pemahaman kinerja pemerintah daerah serta pengembangan ilmu akuntansi sektor publik bagi masyarakat dan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Arisandy. (2016). Analisis Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Aset Daerah. *Indonesia Journal on Networking Security*. Vol.5, No. 4, 2016.
- Auditya, Lucy, dan Husaini Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*. Vol.3, No 1, 2013, 21-41.
- Berrgruen, N., dan Nathan Gardels. (2013). *Intelligent Governance for The 21<sup>st</sup> Century: A Middle Way between West and East*. John Wiley & Sons Inc.
- Bovaird, T., dan E. Loffler. (2003). Understanding public management and governance. In Bovaird, T., dan E. Loffler. (Eds). *Public Management and Governance*. London, UK: Routledge.
- Brata, Aloysius Gunadi. (2004). Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darmi, Titi. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol.22 (1), May 1-13.
- Dharma, F., dan Dwi Martani. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi Lampung*.
- Harianto, D., dan P.H. Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar, Indonesia.
- Hasthoro, H.A. dan Sunardi. (2016). Tata kelola publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19 (1): 53-68.
- Hasthoro, H.A. (2018). Pengaruh Tata Kelola Public terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Pra Kongres ISEI XX*. Bandung, Indonesia.
- Heryana, Toni., dan Dewi, S.K. (2013). Pengaruh Penerapan E- Government terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol1 (1), 2013, 38-49.
- Hill, C.J., dan L.E. Lynn Jr. (2004). Governance and Public Management, an Introduction. *Journal of Policy Analysis and Management* 23 (1): 3-11.
- Hill, C.J., dan L.E. Lynn Jr. (2005). Is Hierarchical Governance in Decline? Evidence from Empirical Research. *Journal of Public Administration Research and Theory* 15 (2): 173-195.
- Ironkwe, U.I., & Ndah, E.N. (2016). Impact of Internally Generated Revenue on performance of Local Government in Rivers State, Nigeria. *International Journal of Business and Law Research*, 4(4), 42-58.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2016. BPKP Republik Indonesia.



- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying integrated DEA/AHP to Evaluate the Economic Performance of Local Governments in China. *European Journal of Operational Research*. 209 (2011) 129–140.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 Nomor1. Mei 2006. Hal2-4
- Martani, Dwi. (2015). Correlation Between Performance Measures and Development Output: Relationship Analysis of EKPPD and HDI. *Finance and Banking Journal*. Vol 17, No 1, 2015.
- Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 6 (1) : 1-17.
- Mustikarini, W.A., dan Fitriasari D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. 2012, Banjarmasin.
- Omodero, C.O., Ekwe, M.C., and Idenhinihu, C.U. (2018). The Impact of Internally Generated Revenue on Economic Development in Nigeria. *Journal Accounting and Finance Research*. Vo 7, No.2, 2018.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance: A suitable case for treatment? in Osborne, S.P. (Ed). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London, UK: Routledge.
- Owusu, V.A. (2015). Assessing the contributions of internally generated funds in the development Of Metropolitan Assemblies in Ghana: a case study of the Kumasi Metropolitan Assembly (KMA). MBA Thesis submitted to the Department of Accounting and Finance, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul BAPPEDA. (2018). Laporan Akhir Indonesia Governance Index (IGI) Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- Pratolo, S. (2008). Transparansi dan AKuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 9 (2): 108-124.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- Simamora, R., dan Abdul Halim. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (10) 1: 47-61.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Syamsul dan I.T. Ritonga. (2017). Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. 21 (3): 448-463.
- Tahar, Afrizal., dan Zakhiya Maulida. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol 12 No 1, 88-99, Januari.
- Tehupuring. R. (2018). Unqualified opinion and level of corruption: the Triangulation approach. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* 4 (2): 187-206.
- Tholen, B. (2015). Citizen participation and bureaucratization: The participatory turn seen through a weberian lens. *International Review of Administrative Sciences*, 0(0), 1-19. doi:10.1177/0020852314548152
- <http://www.kemitraan.or.id/igi/>. Diunduh April 2019.
- <https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>. Diunduh November 2019
- <https://bpkad.bekasikota.go.id/2016/11/07/pengelolaan-aset-daerah/>. Diunduh November 2019
- <https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-informasi/peringkat-dan-status-kinerja-penyelenggaraan-pemda/>. Diunduh November 2019.